

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di  
Kecamatan Dumai Timur

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu  
Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Univesitas Islam Riau



**ABDI ADITYA UTAMA**

**NPM : 167310573**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Abdi Aditya Utama  
NPM : 167310573  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam  
Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

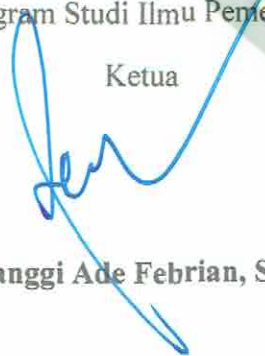
Pekanbaru, 13 September 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Abdi Aditya Utama  
NPM : 167310573  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Ketua,

Sekretaris,

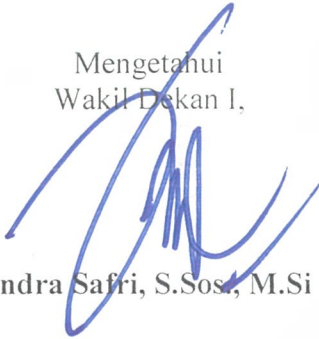
  
Dita Fisdian Adm, S.IP., M.IP

  
Syaprianto, S.Sos, M.IP

Anggota

  
Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1410/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

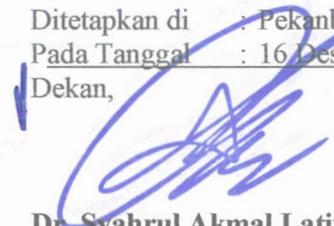
Nama : Abdi Aditya Utama  
N P M : 167310573  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam Meningkatkan Kualitas jalan di Kecamatan Dumai Timur.

**Struktur Tim :**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP       | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. H. Zaini Ali., M.Si.      | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

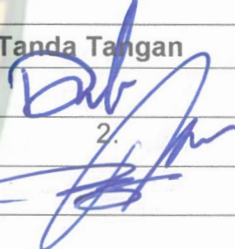
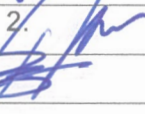
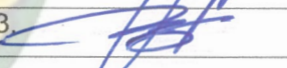
=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

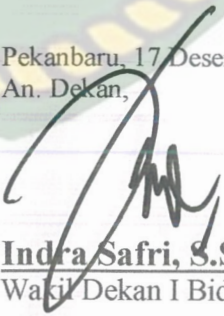
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 410/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 17 Desember 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : ABDI ADITYA UTAMA  
NPM : 167310573  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS JALAN DI  
KECAMATAN DUMAI TIMUR.

Nilai Ujian : Angka : " 7438 " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

| No | Nama                           | Jabatan    | Tanda Tangan                                                                             |
|----|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Ketua      | 1.  |
| 2. | Syaprianto, S.Sos., M.IP       | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Drs. H. Zaini Ali, M.Si.       | Anggota    | 3.  |

Pekanbaru, 17 Desember 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

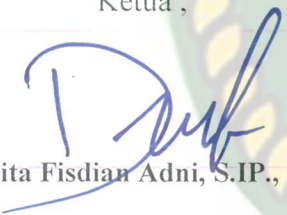
Nama : Abdi Aditya Utama  
NPM : 167310573  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua ,

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

  
Syaprianto, S.Sos, M.IP

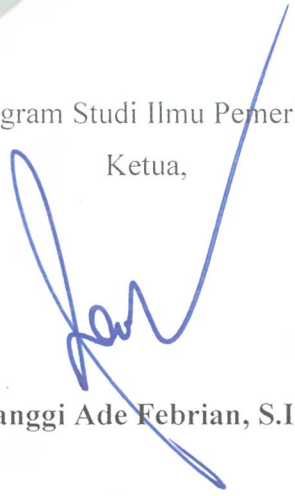
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba Allah yang kutuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Khusus untuk Ayahda **Drs. Sudi Khairul** bersama Ibunda **Evi Sofianita** yang tercinta terima kasih atas keseluruhan limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah Beliau curahkan kepada ku, semoga Allah Swt tetap melimpahkan Rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada Beliau, amin...

Kepada yang tersayang Wanita Dalam Pelukan yang telah membantu ku baik secara materil maupun moril serta memotivasikanku bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt, mencatatnya sebagai amal baik Beliau dan membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal amin...

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur ” dalam penyelesaian skripsi ini penulis dapat banyak bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi

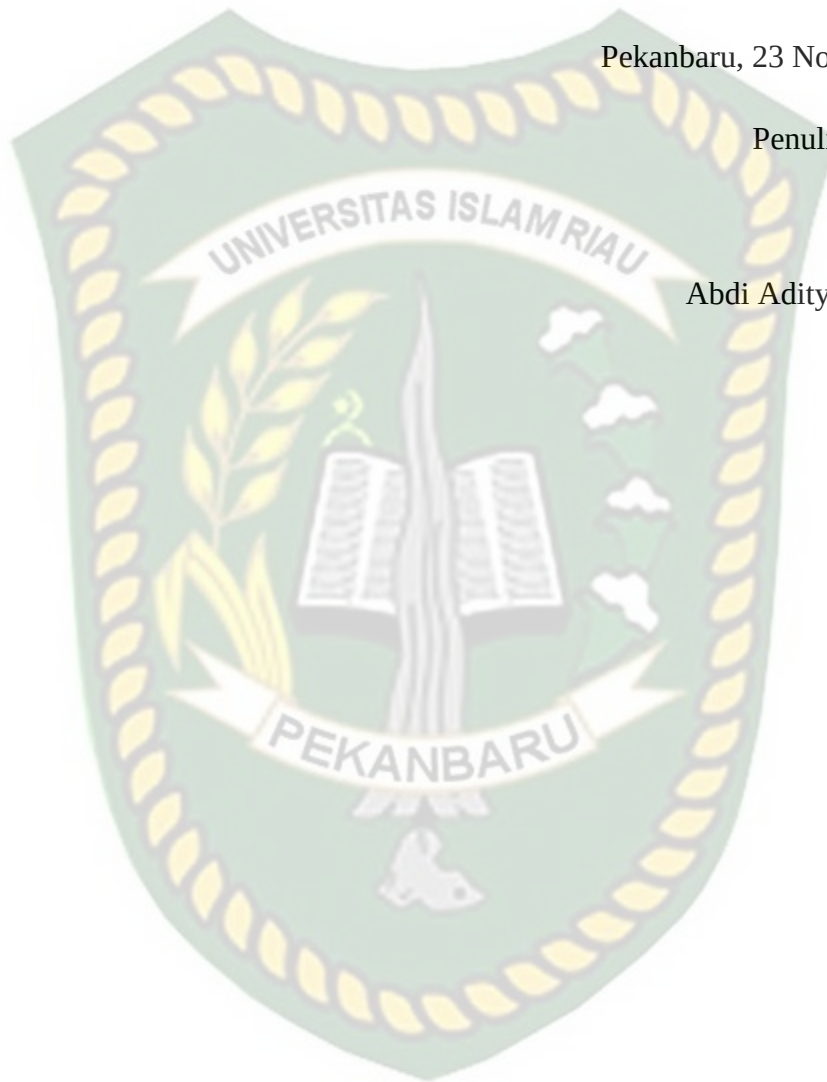
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 23 November 2020

Penulis

Abdi Aditya Utama



## DAFTAR ISI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>BERITA ACARA KOMPREHENSIF.....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                            | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABLE.....</b>                                  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                 | <b>xi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>                    | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                       | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                   | 16          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                    | 16          |
| <b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b> | <b>18</b>   |
| A. Studi Kepustakaan.....                                 | 18          |
| 1. Konsep Pemerintahan.....                               | 18          |
| 2. Konsep Ilmu Pemerintah.....                            | 20          |
| 3. Konsep Pemerintahan Daerah.....                        | 21          |
| 4. Konsep Organisasi.....                                 | 22          |
| 5. Konsep Manajemen dan Manajemen Pemerintah.....         | 24          |
| 6. Konsep Peranan.....                                    | 27          |
| 7. Konsep Tugas dan Fungsi.....                           | 29          |
| 8. Konsep Koordinasi.....                                 | 29          |
| 9. Konsep Jalan.....                                      | 30          |
| B. Penelitian Terdahulu.....                              | 31          |
| C. Kerangka Pikiran.....                                  | 34          |
| D. Konsep Operasional.....                                | 36          |
| E. Operasional Variable.....                              | 37          |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>                   | <b>39</b>   |
| A. Tipe Penelitian.....                                   | 39          |
| B. Lokasi Penelitian.....                                 | 39          |

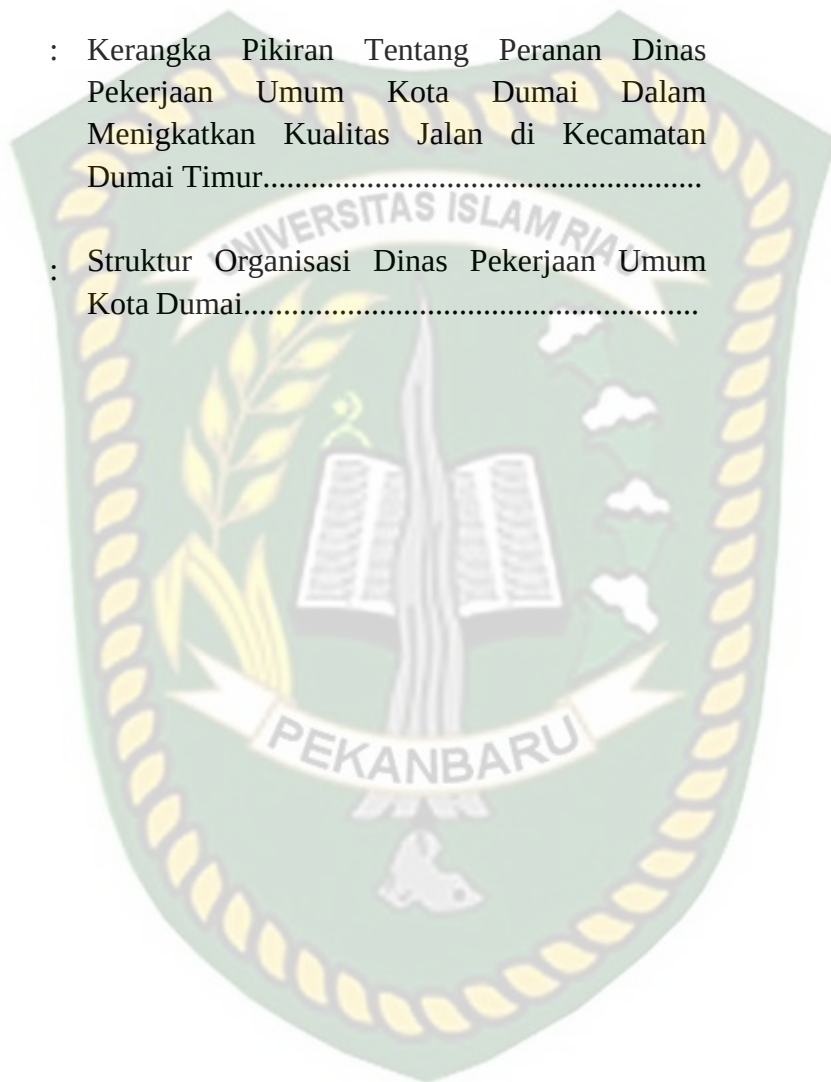
|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Informan dan Key Informan.....                                                                                            | 40        |
| D. Teknik Penetapan Informan.....                                                                                            | 41        |
| E. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                | 41        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                              | 42        |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                                                 | 42        |
| <b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>                                                                         | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Kota Dumai.....                                                                                             | 43        |
| 1. Sejarah Singkat Kota Dumai.....                                                                                           | 43        |
| 2. Letak Dan Luas Wilayah Kota Dumai.....                                                                                    | 44        |
| 3. Penduduk.....                                                                                                             | 45        |
| B. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan<br>Penataan Ruang Kota Dumai.....                                            | 46        |
| C. Struktur Organisasi.....                                                                                                  | 61        |
| <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                          | <b>62</b> |
| A. Identitas Informan.....                                                                                                   | 62        |
| 1. Jenis Kelamin Informan.....                                                                                               | 62        |
| 2. Usia Informan.....                                                                                                        | 63        |
| 3. Pendidikan Informan.....                                                                                                  | 64        |
| B. Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam<br>Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur..                   | 65        |
| 1. Perangkat hak-hak dan kewajiban.....                                                                                      | 66        |
| 2. Aspek dinamis dari kedudukan.....                                                                                         | 72        |
| 3. Prilaku sosial dan fungsi kedudukan.....                                                                                  | 83        |
| C. Hambatan – Hambatan Dinas Pekerjaan Umum Kota<br>Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan<br>Dumai Timur..... | 89        |
| <b>BAB VI : PENUTUP</b>                                                                                                      | <b>91</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                           | 91        |
| B. Saran.....                                                                                                                | 92        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>                                                                                               | <b>93</b> |

## DAFTAR TABLE

|       |   |                                                                                                                                      |    |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.1   | : | Daftar Kondisi Kerusakan Jalan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.....                                                              | 13 |
| II. 1 | : | Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai..... | 37 |
| III.1 | : | Daftar Key Informan dan Informan .....                                                                                               | 40 |
| IV.1  | : | Daftar Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai.....                                                                             | 44 |
| IV.2  | : | Daftar Jumlah Penduduk Kota Dumai.....                                                                                               | 45 |
| V.1   | : | Jenis Kelamin Informan Penelitian.....                                                                                               | 50 |
| V.2   | : | Identitas Informan Berdasarkan Umur.....                                                                                             | 51 |
| V.3   | : | Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                                                                                         | 52 |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                                                                  | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur..... | 35      |
| V.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....                                                                          | 61      |



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdi Aditya Utama  
NPM : 167310573  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1 )  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah'
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Desember 2020

Pernyataan  
  
Abdi Aditya Utama

# **PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS JALAN DI KECAMATAN DUMAI TIMUR**

**ABSTRAK**  
**ABDI ADITYA UTAMA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam meningkatkan kualitas jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan 14 huruf c Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teori Peranan menurut Soekanto (2007:212) peranan (role) dapat juga disebut sebagai aspek dinamis sesuai dengan kedudukannya maka ia memiliki kewajiban menjalankan suatu pemerintahan. Levinson dalam Soekanto (2009: 213) mengatakan peranan seseorang dalam suatu masyarakat mencakup tiga hal, antara lain: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat dan indikator pada peran yang digunakan meliputi norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, struktur sosial. Penelitian dilakukan di Kota Dumai dengan menggunakan metode Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang disesuaikan dengan situasi lapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti.. Berdasarkan teknik analisis diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peranan dinas pekerjaan umum kota dumai belum maksimal dalam meningkatkan kualitas jalan di kecamatan dumai timur

**Kata Kunci : Peranan, Kualitas, dan Jalan**

# THE ROLE OF DUMAI CITY OF PUBLIC WORKS IN IMPROVING ROAD QUALITY IN EAST DUMAI DISTRICT

**ABSTRACT**  
**ABDI ADITYA UTAMA**

*This study aims to determine how the Role of the Dumai City Public Works Service in Improving the Quality of Roads in East Dumai District and to find out the obstacles in improving the quality of roads based on the Dumai City Regional Regulation No. 16 of 2008 Part Four About the Organization and Work Procedure of the Regional Public Works Service. in Articles 13 and 14 letter c Technical planning for the construction, improvement and maintenance of roads and bridges. The author in conducting research using the theory of roles according to Soekanto (2007: 212) role can also be called a dynamic aspect according to his position, so he has the obligation to run a government. Levinson in Soekanto (2009: 213) says the role of a person in a society includes three things, among others: 1) The role includes norms that are related to one's position or place in society. The role in this sense is a series of rules that guide a person in social life. 2) The role is a concept of what individuals can do in society as an organization. 3) The role can also be said as individual behavior that is important for the social structure of society and indicators on the roles used include norms, individuals in society as an organization, and social structures. The research was conducted in the City of Dumai using the Qualitative method, which is a study that is adapted to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature, is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior can be observed. Data collection techniques used consisted of observation or observation, interviews and documentation. The data collected is then used as the main raw material to analyze the empirical condition of the objectivity of the research objectives at the research location. Based on the above analysis techniques, the researcher assesses and concludes that the role of the public works department of Dumai City has not been maximal in improving the quality of roads in East Dumai District.*

**Keywords: Role, Quality, and Path**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S Syre (*dalam Syafiiie 2011:9*) adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan yang terbesar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar

dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, dimana setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan keikhlasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah dengan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan

sebagai unsur Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggaran Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun urusan Pemerintahan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibedakan atas dua jenis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 yaitu:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud urusan pemerintahan abosolut ialah : Politik luar negri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional dan Agama
3. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun pembagian atas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar sebagai berikut :

**a. Wajib Pelayanan Dasar**

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

**b. Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi**

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  9. Perhubungan
  10. Komunikasi
  11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  12. Penanaman Modal
  13. Kepemudaan dan Olahraga
  14. Statistik
  15. Persandian
  16. Kebudayaan
  17. Perpustakaan dan
  18. Kearsipan
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 2 dikatakan Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas

Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Bagian Kedua Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, kabupaten/kota mendirikan organisasi perangkat daerah berupa dinas pekerjaan umum hal ini di perkuat dengan Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan 14 yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya dan bina marga.
- b. Penyusunan rencana teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan.

- c. Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, peralatan dan pengujian.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Yang di maksud perencanaan teknis pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang dimaksud peningkatan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. Dan yang dimaksud dengan Pemeliharaan Rutin (PR) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan

kondisi pelayanan mantap;

Maka dari itu peneliti membuat batasan dalam penelitian pada Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan 14 huruf c perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dan Undang Undang No 38 Tahun 2004 Bagian Kedua Tentang Jalan pada Pasal 9 Ayat (1) . Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dan pada ayat (4) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan

ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. (PPRI 34/2006, pasal 4) Sesuai dengan pasal 4 tersebut terlihat bahwa penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan berlarut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat peningkatan-peningkatan tersebut.

Dalam masalah ini penyebab kerusakan jalan disebabkan oleh beban roda kendaraan berat yang lalulalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat dari salah pada waktu pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan perencanaan. Dengan berbagai penyebab kerusakan ini tentu masyarakat akan semakin tahu bahwa kerusakan ini disebabkan oleh beban roda kendaraan yang berat yang sering berlalulalang, pada umumnya perkerasan dapat digunakan untuk memikul beban lalu lintas, tapi jika beban ini berlebih (over loading), maka yang terjadi adalah perkerasan jalan raya akan rusak sebelum waktunya. Dan kerusakan

ini akan menimbulkan kerugian besar untuk memperbaikinya.

Kota Dumai mempunyai 7 kecamatan yang membutuhkan infrastuktur berupa jalan sebagai sarana penghubung antara ibukota kecamatan ke ibukota atau ke ibukota kabupaten , menggerakan roda perekonomian dan pelayanan terhadap masyarakat namun hal ini tidak sebanding dengan kebutuhan kualitas jalan untuk mendukung segala urusan di Kota Dumai. Terdapat jalan yang rusak bahkan membahayakan pengguna jalan, total keseluruhan jalan diKota Dumai mencapai 1.561.24 km dan jumlah jalan rusak sekitar 227.55 km. Hal ini melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan jalan yang layak dan tidak membahayakan pengguna jalan.

Kasus kerusakan didaerah kecamatan Dumai Timur terjadi karena beban roda kendaraan yang berlalulalang berlebihan dan air hujan yang akhir-akhir ini turun dan membuat perkerasan jalan semakin lemah dan akhirnya jalanpun ambles dan berlubang. Dalam menangani kerusakan semacam ini, misalkan jalan raya yang berlubang sering terlihat bahwa pemerintah hanya menambalnya padahal penambalan ini tidak baik jika dipergunakan untuk kerusakan yang dianggap parah. Jika pada musim penghujan datang kita sering melihat bahwa jalan raya akan mengalami kerusakan yang lebih parah mulai dari sekedar retak buaya, atau bahkan sampai genangan kerbau. Hal ini disebabkan karena daya dukung tanah pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada dalam tanah tersebut. Jika kandungan air optimum sudah terlewati maka daya dukung tanah

akan menurun, apalagi jika sampai muka jalan tergenang maka kondisi *saturated* akan terjadi. Daya lekat antar butiran tanah menjadi sangat kecil bahkan bisa tidak ada sama sekali, gesekan antar partikel sangat menurun dan saling mengunci antar butiran sudah tidak bekerja.

Pada kondisi ini kemampuan tanah mendukung beban boleh dikatakan sangat-sangat kecil. Sedangkan kendaraan tetap akan lewat, akibat beban kendaraan yang menekan muka jalan maka terjadilah pelepasan ikatan antar butiran pada tanah, dan akan mengakibatkan permukaan jalan menjadi pecah dan amblas. Kerusakan jalan ini seperti berupa retak-retak (*cracking*), berupa gelombang (*corrugation*), juga kerusakan berupa alur/cekungan arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan (*rutting*) ada juga berupa genangan aspal dipermukaan jalan (*bleeding*), dan ada juga berupa lobang-lobang (*pothole*).

Dari kerusakan jalan menimbulkan dampak bagi kalangan umum pengguna jalan. Kerusakan jalan raya ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya, kenapa mengganggu kenyamanan karena pada dasarnya karena kerusakan ini akan mengakibatkan kemacetan, dan apalagi saat hujan deras mengguyur kawasan rusak ini, air akan menggenang dan menutupi jalan rusak(berlubang) akhirnya masyarakat menjadi cemas dan was-was. Kecemasan dan kemacetan inilah yang dimaksud mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Selain itu Kerusakan jalan ini bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Menurut data Kepala Unit Laka Kepolisian Resor Kota Dumai tahun 2016 hingga sekarang

ada setidaknya 162 kasus dengan kerugian materil sebesar Rp.287.000.000,- yang disebabkan oleh jalan rusak, dari 162 kasus itu terdapat 6 kasus yang menyebabkan pengguna jalan meninggal dunia dan ada 4 kasus kecelakaan yang disebabkan jalan rusak terjadi diwilayah hukum Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, 2 kasus terjadi di Jl. Soekarno-Hatta yang melibatkan korban luka-luka, 1 kasus terjadi di JL.Datuk Laksamana yang melibatkan sebuah kendaraan roda 4 hilang kendali untuk menghindar jalan berlubang korban mengalami hanya kerugian materil. 1 kasus terjadi di JL. Sultan Syarif Kasim yang mengakibatkan kendaraan tangki air mengalami patah as roda.

Menurutnya jika kerusakan jalan tidak diatasi dengan cepat maka angka kecelakaan pengguna jalan raya di Kota Dumai dapat meningkat seiring waktu, mengingat padatnya lalu lintas di jalan raya tidak bisa dipungkiri bahwa kepadatan ini mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika jalan rusak dan didukung dengan ketidak hati-hatian pengguna jalan, bisa dipastikan akan menambah nilai kecelakaan, berikut kerusakan jalan di Kecamatan Dumai Timur dipaparkan dalam bentuk table :

**Tabel I.I : Daftar Kondisi Kerusakan Jalan di Kecamatan Dumai Timur**

| No | Nama Jalan                | Klasifikasi Status Jalan | Kondisi Jalan |        |       |
|----|---------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|
|    |                           |                          | Baik          | Sedang | Rusak |
| 1  | Jl. Soekarno-Hatta        | Kab/Kota                 |               |        | ✓     |
| 2  | JL.Datuk Laksamana        | Kab/Kota                 |               |        | ✓     |
| 3  | Jl. Arifin Ahmad          | Kab/Kota                 |               |        | ✓     |
| 4  | Jl. Bukit Datuk           | Kab/Kota                 | ✓             |        |       |
| 5  | Jl. Putri Tujuh           | Kab/Kota                 | ✓             |        |       |
| 6  | Jl. Sultan Syarif Kasim   | Kab/Kota                 |               | ✓      |       |
| 7  | Jl. Brigjen HR Soebrantas | Kab/Kota                 | ✓             |        |       |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Nb :

Baik : Jalan yang di lalui tidak terdapat retak-retak (*Cracking*),

Sedang : Jalan yang di lalui terdapat retak-retak (*Cracking*)

Rusak : Jalan yang di lalui terdapat lubang-lubang (*pothole*)

Berdasarkan table di atas, terbukti bahwa jalan di sejumlah ruas diKecamatan Dumai Timur masih banyak kondisi jalan yang tidak layak untuk dilewati jalan yang berkategori rusak ada 3 (tiga) ruas jalan meliputi : Jl. Soekarno-Hatta, JL.Datuk Laksamana, Jl. Arifin Ahmad. Jalan yang berkatogori sedang meliputi 1 (satu) ruas jalan yaitu : Jl. Sultan Syarif Kasim. Sedangkan jalan yang berkategori baik

berjumlah 3 (nol) ruas jalan yang meliputi Jl. Bukit Datuk, Jl. Putri Tujuh dan Jl. Brigjen HR Soebrantas.

Pada jalan Soekarno-Hatta sebagai pintu masuk ke kota Dumai terdapat jalan rusak yang di akibatkan oleh kendaraan bertonase besar seperti truk pembawa BBM, sembako, pasir, dan sawit sehingga pada jalan tersebut menimbulkan kerusakan yang parah sehingga masyarakat tidak bisa menikmati jalan yang layak. Masyarakat hanya menambal jalan yang berlubang dengan bahan-bahan seadanya dengan meminta uang kepada pengguna jalan yang kemudian dibelikan krikil, tanah kuning, dan pecahan bangunan yang dirobuhkan dengan harapan jalan yang berlubang tadi tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Keadaan ini sangat di sayangkan mengingat Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas untuk memelihara jalan, Dinas Pekerjaan Umum di anggap tidak meperhatikan keselamatan masyarakat yang melintas di jalan berlubang tersebut apalagi ketika malam jalan yang berlubang tidak bisa dilihat oleh pengguna jalan dan di perparah dengan musim hujan yang membuat jalan berlubang tersebut tergenang dan membahayakan masyarakat yang melintas.

Setelah jalan Soekarno-Hatta truk pembawa muatan Bahan Bakar Minyak (BBM), pasir, sembako dan hasil sawit tersebut melintas pada jalan Datuk Laksamana untuk menurunkan muatannya di masing perusahaan yang lagi-lagi menyebabkan jalan yang dilintasi truk rusak hal ini menjadi efek domino yang di sebabkan oleh kendaraan besar. Dinas Pekerjaan Umum di duga lepas tangan

akan masalah ini mengingat jalan adalah prsarana untuk menggerakan roda perekonomian maka dari itu jika pemeliharaan jalan di anggap sepele maka akan menyebabkan kelangkaan sejumlah barang yang di perlukan masyarakat dan jasa pelayanan terganggu akibat jalan rusak tersebut.

Pada kasus kerusakan di jalan Arifin Ahmad sebagai pintu masuk lainnya ke kota dumi, kerusakan terhadap jalan tersebut bukan disebabkan oleh kendaraan besar melainkan kurangnya drainase di sepanjang jalan tersebut sehingga jalan tergenang air yang bisa mengakibatkan jalan rapuh dan lama-lama berlubang dengan masalah drainase jalan tersebut air di lubang jalan tersebut tidak surut sehingga membuat tanah atau pondasi jalan rapuh. Rapuh nya pondasi mengakibatkan turunnya ketinggian jalan sehingga jalan menjadi patah, ketika pengendara melewati jalan tersebut akan merasakan guncangan terhadap kendaraan mereka jika pengendara sepeda motor tidak mengetahui adanya patahan jalan tersebut akan mengakibatkan terpelantingnya pengendara motor tersebut.

Jalan Sultan Syarif Kasim dan hanya mengalami kerusakan sedang yang disebabkan oleh insesitas kendaraan yang lewat cukup tinggi, sehingga jalan mengalami retak-retak hal ini membuat kenyamanan berkendara berkurang apalagi jalan Sultan Syarif Kasim berada tepat di tengah kota sehingga nilai estetika berkurang akibat jalan retak-retak tersebut. Dalam meningkat kualitas jalan raya di kecamatan dumi timur

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menemukan beberapa

fenomena dilapangan yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum maksimal terhadap meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Timur.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dianggap mekesampingkan keselamatan pengguna jalan yang sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Bab 1 Pasal 1 no 1 yaitu Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. **Bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai**
2. **Apa Hambatan Yang Di Hadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Timur ?**

#### **C. Tujuan Penilitan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penilitan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Raya di Kecamatan Dumai timur Kota Dumai,
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan raya diKecamatan Dumai Timur

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara Akademis :

- a. Sebagai salah satu sumber bacaan, dan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dibidang ilmu sosial, khususnya dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.

Secara praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan insfrastruktur
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi atau bahan masukan bagi pemerintah kota dumai untuk membentuk organisasi daerah yang bersih dan inovasi

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut ndraha (2003:5) pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa politik dan layanan *civil*. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign*, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. Pada dasarnya proses-proses itu kumulatif proses *demand-supply*, produksi konsumsi, pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi, pembelian, penerimaan, penggunaan dan evaluasi *feedback*.

Pemerintahan adalah sebuah proses produksi dan distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan tuntutan rakyat, Ndraha (2003:146). Secara umum pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Dari sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka.
2. Dari sistem pemerintahan birokratis-partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan.
3. Dari system pemerintah *hyper* sentralistik ke system pemerintah desentralistik.
4. Dari pertanggung jawaban *vertical* ke penanggung jawaban horizontal.
5. Dari paternalisme *despotic* ke *control* sosial.

6. Dari suksesi (penggantian jabatan) berdasarkan dinasti atau anugerah ke *recruitment* dan *selection*.
7. Dari lompatan ke tahap teknologi
8. Dari manajemen proyek ke manajemen fungsi dan tugas.
9. Dari budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik.
10. Dari kita menjadi saya.
11. Unit kerja pemerintahan yang paling bawah di perlukan sebagai embel- embel, pelengkap penderita, diabaikan.
12. Dari pemberian pemberdayaan.
13. Dari sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aspirasi rakyat kalimat sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bahas birokrasi.
14. Dari menolong ke dialog (Ndraha 2003: 149)

Sedangkan menurut Ndraha (dalam wasistiono dan Rahyunir, 2003:6) menyatakan pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Pemerintah ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok agar dapat menjalankan pelayanan untuk dapat memisahkan keadilan, dan kemandirian serta dapat menciptakan pembangunan dan kemakmuran untuk masyarakat, Rasyid.

Menurut Awang dan Wijawa (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menciptakan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat-istiadat, insitusi dan hukum dalam sebuah negara, pemerintah ialah organ yang mengurus layanan public untuk Warga Negara Asing yang berada pada wilayah Indonesia yang hak untuk bertempat tinggal di negara Indonesia

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Menurut Ndaraha (2003:6) mengartikan pengertian pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang ingin melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Lebih lanjut lagi Ndaraha (2005:36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk dapat memenuhi dan melindungi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Syafiie (2005:22) Pemerintahan yaitu dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan perundang-undangan, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan

untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

### 3. Konsep Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah Negara Republik Indonesia memiliki filsafat Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 kerangka kenegaraan dan sistem Pemerintah Republik Indonesia diatur. Negara Indonesia adalah Negara konsitusi yang menggunakan sistem demokrasi dan bentuk Negara kesatuan. Untuk menyelenggarakan Negara Indonesia, dibentuk lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu :

1. Legaslatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif
4. Pemeriksa Keuangan

Namun melihat wilayah Negara Indonesia sangat besar dengan letak geografi luas dengan kondisi sosial budaya yang beragam. UUD 1945 kemudia mengatur perlunya pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan (Nurcolis:2005).

Pengembangan perwilayahan adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan kondisi atau potensi dan masalah serta spesifikasi setempat, dimana seluruh potensi secara utuh dab terpadu tetap

memandang dan mengingat kewenangan pemerintah daerah yang bersakutan Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat. Disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap Pemerintahan Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan ( Sarundajang, 2001:1). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sadarmayanti ( 2004:1 ) didalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### **4. Konsep Organisasi**

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka didalam dimana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang di satukan.

Kelangsungan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai suatu usaha sebagaimana yang tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi adalah sumber daya manusia agar dapat mendukung sebuah kelangsungan organisasi.

Organisasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat kerja sama agar mencapai tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan

organisasi dapat terbantu untuk persirakatan manusia agar tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas, dari proses pengorganisasian.

Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif, staf administratif bertanggungjawab terhadap pemeliharaan organisasi dan menkoorfinasikan kegiatan-kegiatan organisasi. Organisasi seperti itu biasanya disebut birokrasi. Menurut Max Weber yang mengembangkan teori birokrasi, organisasi-organisasi yang dibentuk menurut cara-cara birokrasi mempunyai sifat-sifat tipe ideal birokrasi yaitu :

1. Suatu pengaturan fungsi seni yang terus menerus diatur menurut aturan.
2. Suatu bidang keahlian tertentu, yang meliputi :
  - a. Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian pekerjaan yang sistematis.
  - b. Ketepatan mengenal otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu
3. Organisasi kepegawaian menurut prinsip hirarki, artinya pegawai rendah dibawah pengawasan dan mendapat supervise dari seseorang yang lebih tinggi.
4. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seseorang dapat merupakan pengaturan atau norma yang bersifat teknis
5. Dalam tipe rasional hal itu merupakan masalah prinsip bahwa para anggota staf administratif harus sepenuhnya terpisah dari kepemilikan alat-alat produksi atau administratif.

Kemudian dalam organisasi terdapat perilaku organisasi itu sendiri dimana perilaku organisasi ini memaparkan tentang tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. “ perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu “. ( Hamin, 2005:45 )

### **5. Konsep Manajemen dan Manajemen Pemerintahan**

Manajemen menurut Sulistiayani dan Risida, 2009 (dalam danang 2012:2) George R.Terry (dalam danang 2012:2) manajemen adalah kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi yang dapat ditentukan terlebih dahulu dengan bantuan dari orang lain, agar dapat menjalankan organisasi secara teratur. Jhon M.Pfifner (dalam danang 2012:2) manajemen mengharuskan seorang melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner dan Freeman (dalam danang 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hasibuan (2006:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Suprianto (2009:27) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya manajemen pemerintahan muncul dari berbagai fungsi pemerintahan dalam rangka melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya sesuai fungsi negara. Fungsi Negara menurut Borre dan Goldsmith dalam supriyatno (2009:45-46) adalah :

1. Berkaitan dengan pertanahan yakni melindungi dan mengembangkan wilayah negara.
2. Berkaitan dengan keamanan internal, yakni penegak hukum.
3. Peningkatan kesejahteraan penduduk, pemeliharaan legitimasi ideology dan simbolik.

Sedangkan fungsi manajemen pemerintah menurut Supriyanto (2009:46) dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Manajemen pemerintah berarti membuat keputusan-keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan kekuasaan pemerintah baik sebagai pimpinan negara pemerintahan maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Manajemen pemerintahan mengharuskan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
9. Manajemen pemerintahan berarti menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan dibidang tata kelola pemerintahan.
10. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola.
11. Manajemen pemerintahan berarti menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang akan menempati jabatan dibidang pemerintahan.
13. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan bimbingan dan mengontrol atas penyelenggaraan otomi daerah yang meliputi kelembagaan pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi bidang tata kelola pemerintahan.
14. Manajemen pemerintahan merupakan penganturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang di sahkan atas nama negara bidang tata

kelola pemerintahan.

15. Manajemen pemerintahan seperti pelayanan standar pemberian izin untuk investor.
16. Manajemen pemerintahan berarti pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Manajemen pemerintahan berarti penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Manajemen pemerintahan memiliki arti untuk menetapkan arahan agar dapat melaksanakan pengawasan yang berada pada bidang tata kelola pemerintahan.
19. Manajemen pemerintahan berarti penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

## **6. Konsep Peranan**

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajiban. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin tidak jelas. Menurut sedarmayanti (2004:33) tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Peranan menurut soekanto (2007:212) peranan (role) dapat juga disebut sebagai aspek dinamis sesuai dengan kedudukannya maka ia memiliki kewajiban menjalankan suatu pemerintahan.

Levinson dalam Soekanto (2009: 213) mengatakan peranan seseorang dalam suatu masyarakat mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut kansil dan cristine (2003:190) kebijakan merupakan aturan-aturan yang dijadikan acuan, landasan bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Dari pengertian peranan dari soekanto, yang mana menjelaskan bahwa didalam peranan terdapat kedudukan peranan ada apabila ada kedudukan, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan. Jadi peranan merupakan aspek fungsional dari kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya.

## 7. Konsep Tugas dan Fungsi

Thoha (2011:76) tugas pokok adalah suatu pencapaian yang harus dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan kerja berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi tersebut. Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tanggung jawab, pemerintah yang sudah diberikan untuk mencapai sebuah tujuan.

Menurut Moenir (2010:18) tugas di gunakan untuk memajukan suatu bagian atau unsur dalam suatu tugas, jabatan, atau pekerjaan khusus yang telah diberikan guna mencapai tujuan. Menurut Winardi (2003:26) tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh pegawai yang saling berkaitan menurut tugas pelaksanaan guna mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut.

## 8. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Menurut Yohanes Yahya (2006 : 95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Handoko (2003 : 195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. G.R Terry dalam Hasibuan ( 2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif.

## **9. Konsep Jalan**

Berdasarkan UU RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedang berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU No 38 mendefinisikan

jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, guna untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka, peneliti mencantumkan hasil - hasil penelitian terdahulu.

Bambang E. Yuwono, Dewi Rintawati, Supriyono (2014) dalam penelitian yang berjudul “ Faktor Kunci Dalam Penentuan Prioritas Penanganan Kerusakan Jalan “ menunjukan hasil penelitian bahwa sebagai akibat dari turunnya tingkat layanan jalan maka akan menyebabkan kenaikan biaya transportasi. Kenaikan biaya transportasi ini diakibatkan secara langsung oleh peningkatan konsumsi bahan bakar, percepatan keausan mesin/rem/kopling/ban, dan peningkatan tingkat pencemaran udara serta peningkatan ketidaknyamanan perjalanan (menurunnya tingkat kecepatan perjalanan) yang menyebabkan *stress* dan dampak-dampak lanjutannya.

Dengan demikian penanganan kerusakan jalan tidak hanya bersifat teknis saja, namun lebih dari itu, kerusakan jalan mempunyai efek berantai yang berujung pada kerugian masyarakat dan berpotensi menghambat pengembangan wilayah. Masalah menjadi semakin rumit bila dana untuk penanganan kerusakan jalan terbatas, sehingga perlu dilakukan penanganan kerusakan mengikuti skala prioritas, untuk itulah diperlukan kriteria yang dapat digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan prioritas penanganan kerusakan jalan.

Persamaan dalam penilitan ini adalah sama-sama membahas tentang kerusakan jalan serta efek domino yang ditimbulkan akibat turunnya pelayanan terhadap jalan dan perbedaan dalam penilitian yang ditulis Bambang E. Yuwono, Dewi Rintawati, Supriyono (2014) perbedaan dalam peniliti adalah tidak disebutkan penyebab kenapa jalan tersebut rusak, penilitian tersebut tidak menampilkan secara spesifik kerugian seperti apa yang ditampilkan.

Berikutnya penilitan yang berjudul “ Dampak Insfrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Pulau Jawa-Bali dan Sumatera “ yang diteliti oleh Muktar Napitupulu, Mangara Tambunan, Arief Daryanto, dan Rina Oktavian (2011) dengan kesimpulan penilitian :

1. Dibutuhnya alokasi anggaran yang tepat untuk sektor jalan dan jembatan di sumatera dan jawa - bali sehingga dapat mengurangi kesenjangan (disparitas) dan mendukung pemerataan (growth with equity)
2. Supaya sektor jalan dan jembatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomu signifikan di sumatera untuk mengerjar ketinggalan dari Jawa-Bali, diperlukan “keperpihakan” investasi jalan di Sumatera

3. Pembangunan Sektor jalan dan jembatan di Indonesia Berpotensi mempercepat perubahan wilayah berbasis mempercepat perubahan wilayah berbasis pertanian menuju industrial

Persamaan penelitian adalah membahas tentang kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena timpangnya pembangunan infrastruktur jalan, dan perbedaan penelitian tersebut penulis hanya membahas kerugian aspek ekonomi berskala kecil mengingat penelitian ini hanya di teliti tingkat Kabupaten/Kota.

Penelitian terdahulu berikutnya ditulis oleh Gede Budi Suprayoga dan Agus Bari Sailendra (2013) yang berjudul “*Analytical Hierarchy Process Untuk Pemilihan Alternatif Pembiayaan Penanganan Jalan* “ hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan produk regulasi yang diciptakan, kalkulasi sosial dan politik serta kalkulasi pendapatan daerah dengan urutan skala prioritas pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) membuat efesiensi dalam penanganan jalan di Indonesia. Persamaan Penelitian ini adalah setiap pembangunan jalan harus menkedepankan aspek kehidupan sosial dan keterbukaan dalam pembiayaan penanganan jalan, Perbedaan dalam Penelitian Ini adalah Penulis membatasi hanya terhadap aspek sosial.

Penelitian berikutnya berjudul “ Pengembangan Model Analitis Perhitungan Temperatur Perkerasan Jalan Untuk Penentuan Kelas Kinerja Aspal ” yang ditulis oleh Sri Yeni M dan Djoko Widayat (2013). Dengan hasil penelitian dalam menentukan kelas kinerja aspal harus melihat faktor geografis, temperature dan udara sehingga kualitas jalan terjaga dan berkategori *Perfomance Grade* (GD) dengan hasil temperatur di wilayah panas adalah 55

derajat celcius dan daerah sedang 44 derajat celcius. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas secara teknis dalam pengaspalan jalan raya, perbedaannya penulis ingin membahas secara spesifik dalam pembuatan aspal dengan kategori *Perfomance Grade* (GD).

“ Penggunaan Karet Alam Untuk Meningkatkan Fisik Aspal Keras ” yang ditulis oleh Iriansyah, AS dengan hasil penelitian penambahan karet dalam aspal akan menambah umur atau ketahanan aspal tersebut dengan demikian efesiensi dalam pembangunan akan terealisasi. Persamaan penelitian dengan penulis adalah membahas tentang inovatif dalam pengembangan kualitas jalan raya, perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan sampah plastik atau sejenis dalam pencampuran aspal.

Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Hikmat Iskandar berjudul “ Standar Jalan Yang Berwawasan Keselamatan Transportasi Darat “ dengan hasil Penelitian Jalan harus menjamin keselamatan berkendara dan tidak membahayakan, jalan harus mempunyai kategori berdasarkan Volume kendaraan, fungsi dan sistem jaringan. Persamaan penelitian ini adalah membahas keselamatan berkendara di jalan raya, perbedaan penulis akan membahas sebab akibat jalan rusak terhadap pengguna jalan raya.

### **C. Kerangka Pikiran**

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang di gambarkan dalam diagram sebagai berikut

**GAMBAR II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas**



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

#### D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan kesatuan pendapat dalam penelitian ini dan untuk menghindarkan interpretasi yang berada dengan konsep yang digunakan, maka diperlukan persamaan konsep dalam indikator-indikator variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Peranan adalah peranan dalam tujuan menjalankan tugas dan fungsi dinas Pekerjaan Umum kota Dumai.
2. Jalan adalah sarana yang bisa dilintasi kendaraan bermotor untuk menghubungkan satu kawasan ke kawasan lainnya.
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah organisasi perangkat daerah atau kantor pemerintahan yang tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan jalan raya.
4. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling dimana didalamnya terdapat aktifitas mendefinisikan tujuan organisasi.
5. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan- tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.
6. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
7. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.I : Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai**

| Konsep<br>1                                                            | Variable<br>2                                            | Indikator<br>3                      | Item penilaian<br>4                                                                                  | skala<br>5 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). (Soekanto, 2001:243) | Meningkatkan kualitas jalan raya dikecamatan dumai timur | Perangkat hak-hak dan kewajiban     | - Koordinasi antar pihak yang berwenang didalam dinas pekerjaan umum dalam pemeliharaan jalan        |            |
|                                                                        |                                                          | Aspek dinamis dari kedudukan        | - Melakukan pengawasan terhadap jalan yang rusak<br>- Tindak lanjut dari penanganan jalan yang rusak |            |
|                                                                        |                                                          | Prilaku sosial dan fungsi kedudukan | - Menjalankan fungsi sesuai peraturan tentang Peraturan Daerah                                       |            |

| Konsep | Variable | Indikator | Item penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                             | skala |
|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     |
|        |          |           | <p>Bagian Keempat</p> <p>Tentang</p> <p>Organisasi dan</p> <p>Tata Kerja Dinas</p> <p>Pekerjaan Umum</p> <p>Daerah pada Pasal</p> <p>13 dan huruf (c)</p> <p>yaitu Perencanaan</p> <p>teknis</p> <p>pembangunan,</p> <p>peningkatan dan</p> <p>pemeliharaan jalan</p> <p>dan jembatan.</p> |       |

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penggunaan tipe penelitian ini untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kualitatif melalui gambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada, penelitian dibatasi dengan data yang terkumpul dari sampel yang mewakili populasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe *deskriptif*, menurut darmadi (2013;6) yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, adapun analisa dalam penelitian ini mengenal permasalahan yang dihadapi. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di pemerintahan Kota Dumai yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selaku yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan dan pemeliharaan jalan yang berada di Kecamatan Dumai Timur. Alasan penulis melakukan penelitian di kecamatan Dumai Timur adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum kota dumai dalam kewenangan meningkatkan kualitas jalan raya di kecamatan Dumai timur.

### C. Informan dan Key Informan

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, informan menggunakan teknis, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat peran dinas pekerjaan umum dalam meningkatkan kualitas jalan raya. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur dan sebagai informan tambahan yaitu Ketua Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Camat Dumai Timur dan pengguna jalan raya.

**Tabel III.1 : Informan dan Key Informan**

| NO | Nama                   | Jabatan                                                                            | Keterangan        |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Zulkarnain S.sos, M.si | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai                                        | Informan Tambahan |
| 2. | H. Nur Istiqal S.T     | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota DUmair                          | Informan Tambahan |
| 3  | Dona Tri Nurharani     | Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Dumai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai | Key Informan      |
| 4. | Zulfahren S.sos, M.Si  | Camat Dumai Timur                                                                  | Informan Tambahan |
| 5  | Arif                   | Pengguna Jalan Raya                                                                | Informan Tambahan |

|    |                |                     |                   |
|----|----------------|---------------------|-------------------|
| 6  | Rahmat Hidayat | Pengguna Jalan Raya | Informan Tambahan |
| 7. | Nur            | Pengguna Jalan Raya | Informan Tambahan |
| 8  | Putri          | Pengguna Jalan Raya | Informan Tambahan |

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

#### **D. Teknik Pentapan Informan**

Teknik pengambilan sample responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik snowball sampling, *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sample yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian sample ini disuruh teman- temannya untuk dijadikan sample ( Sugiyono, 2018:125 ). Begitu seterusnya sehingga sample semakin banyak, ibarat bila salju yang mengelinding makin lama makin besar.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil obersevasi yang berkaitan dengan masalah peniliti.

##### **2. Data skunder**

Data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang di anggap perlu

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik.

### 1. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis atau bersifat terbuka adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan menggunakan daftar pertanyaan mengenai Peranan Dinas Pekerjaan Umum di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

### 2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan Peranan Dinas Pekerjaan Umum di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang akan di teliti sehingga diperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen- dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian

## G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diolah dipersentasekan untuk dianalisa secara deskriptif dengan data yang ada guna dilakukan analisa

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Dumai

##### 1. Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kota Dumai memiliki 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 1.623,38 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 280.174 jiwa (2017) dengan sebaran 172 jiwa/km<sup>2</sup>. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai, adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.I : Daftar Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai**

| Kecamatan       | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan                                                         |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dumai Barat     | 4                | Bagan Keladi, Pangkalan Sesai, Purnama, Simpang Tetap Darul Ichsan       |
| Dumai Timur     | 5                | Bukit Batrem, Buluh Kasap, Jaya Mukti, Tanjung Palas, Teluk Binjai       |
| Dumai Selatan   | 5                | Bukit Datuk, Mekar Sari, Bukit Timah, Ratu Sima, Bumi Ayu                |
| Dumai Kota      | 5                | Rimba Sekampung, Laksamana, Dumai Kota, Bintan, Sukajadi                 |
| Medang Kampai   | 4                | Guntung, Mundam, Pelintung, Teluk Makmur                                 |
| Bukit Kapur     | 5                | Bagan Besar, Bukit Kayu Kapur, Bukit Nenas, Gurun Panjang, Kampung Baru  |
| Sungai Sembilan | 5                | Bangsai Aceh, Basilam Baru, Batu Teritip, Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal |

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

## 2. Letak Dan Luas Wilayah Kota Dumai

Rata-rata ketinggian adalah 3 meter di atas muka laut. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-30 °C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0-0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai. Sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke hulu sungai. Luas Wilayah Kota Dumai ialah 1.772,38km<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis

Sebelah Timur : Bukit Batu, Bengkalis

Sebelah Selatan : Mandau, Bengkalis dan Bukit Batu, Bengkalis

Sebelah Barat : Bangko, Rokan Hilir dan Tanah Putih, Rokan Hilir

### 3. Penduduk

Penduduk Kota Dumai Tahun 2010, berjumlah 253.803 jiwa yang terdiri atas 131.465 jiwa laki-laki dan 305.338 jiwa perempuan. Dengan Kepadatan Penduduk 178.00 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 3,51 persen/tahun.

**Tabel IV.II : Daftar Jumlah Penduduk Kota Dumai**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|----|-------|-----------------|
| 1  | 2000  | 173.188 jiwa    |
| 2  | 2008  | 236.778 jiwa    |
| 3  | 2010  | 253.803 jiwa    |
| 4  | 2012  | 277.995 jiwa    |
| 5  | 2019  | 308.812 jiwa    |

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

## B. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan Penataan Ruang

### Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Dumai. Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas pebantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan PLP, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim
- b. Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Marga, Bidang Air Minum dan PLP, Bidang Jasa Konstruksi Bidang Tata Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai satu kesatuan dari tugas dan fungsi dinas tersebut. Adapun susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Air Minum dan PLP;
- f. Bidang Jasa Konstruksi;
- g. Bidang Tata Ruang;
- h. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkini;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- j. Unit Pelaksana Teknis.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan;

- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Subbagian Data dan Informasi Publik.

#### c. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku dan drainase.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi.:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber daya Air
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air;
- 4) penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 5) penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 6) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan

sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

- 7) penyusunan studi evaluasi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air
- 8) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 9) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- 10) pengelolaan sistem hidrologi;
- 11) pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- 12) pelaksanaan kegiatan penyediaan air tanah yang layak dikonsumsi masyarakat;
- 13) pelaksanaan Konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dibidang sumber daya air;
- 14) penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 15) penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
- 16) penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- 17) koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder terhadap pengelolaan pemanfaatan sumber daya air
- 18) pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air; dan

19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
- 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Bina Marga;
- 4) penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;

- 5) pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- 6) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 7) pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum dan pengujian;
- 8) pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- 10) pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- 11) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan- teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- 12) pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang, Air Minum dan PLP

Bidang Air Minum dan PLP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidano Air Minum dan PLP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Air Minum dan PLP mempunyai tugas menyeleneearakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang air minum dan PLP. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM, Sistem Drainase lingkungan dan pengembangan Sistem Sanitasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Air Minurn dan PLP mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang sumber daya air
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang air minum dan PLP
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang air minum dan PLP
- 4) pengelolaan dan pengembangan SPAM
- 5) pengelolaan dan pengembangan Sistem Sanitasi;
- 6) pengembangan Sistem Drainase lingkungan.
- 7) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
- 8) pelaksanaan administrasi Bidang Air Minum dan PLP dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Air Minum dan PLP terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan SPAM
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

f. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang sumber daya air
- 2) ko-ordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang jasa konstruksi
- 4) pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi
- 5) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kota Dumai
- 6) pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kota Dumai
- 7) pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota
- 8) melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib

pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota

- 9) pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kota dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota
- 10) penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi serta perizinan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 11) pengajuan usulan pembatalan dan atau pencabutan izin usaha jasa konstruksi terhadap pelaku jasa konstruksi yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 12) peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kota Dumai
- 13) pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kota Dumai
- 14) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya air, bina marga, Air minum dan PLP, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Bangkim serta lintas sektor dengan Dinas/ Kantor Badan dan/ atau lembaga lainnya, baik bersumber dari dana APBD Kota Dumai maupun sumber dana lainnya;
- 15) pelaksanaan pengelolaan perbengkelan (*workshop*) dan serta pengkoordiniran pemakaian dan pendistribusian peralatan operasional dan perbekalan dinas;
- 16) pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan operasional dan perbekalan dinas;
- 17) pelaksanaan administrasi Bidang Jasa Konstruksi; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

- 1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;
- 2) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Laporan.

g. Bidang Tata Ruang Bidang

Tata Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan — undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi.

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Tata Ruang;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Tata Ruang,
- 4) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Detail Tata. Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- 5) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengaturan Penataan Perkotaan dan Perdesaan

- 6) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 7) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- 8) penyelenggaraan pengelolaan1-1 Pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- 9) pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- 10) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan;
- 11) koordinasi pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait
- 12) pemberian rekomendasi teknis terhadap mendirikan bangunan;
- 13) pelaksanaan penetapan kebijakan serta, pengembangan pengelolaan Larnpu Jalan, Taman dan Sarana Prasarana lainnya;
- 14) pelaksanaan administrasi Bidang Tata Ruang; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari:

- 1) Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan,
- 2) Seksi RTH Pertamanan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana,program dan anggaranSeksi Pengaturan, Pembinawi dan Pelaksanaan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 2) melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang detail dan rinci lainnya;
- 3) menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten Pelalawan;
- 4) koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- 5) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta menyebarkan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- 6) melaksanakan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- 7) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Perencanaan Teknis secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- 8) melaksanakan standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- 9) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- 10) melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;

12) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

13) melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tata. Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

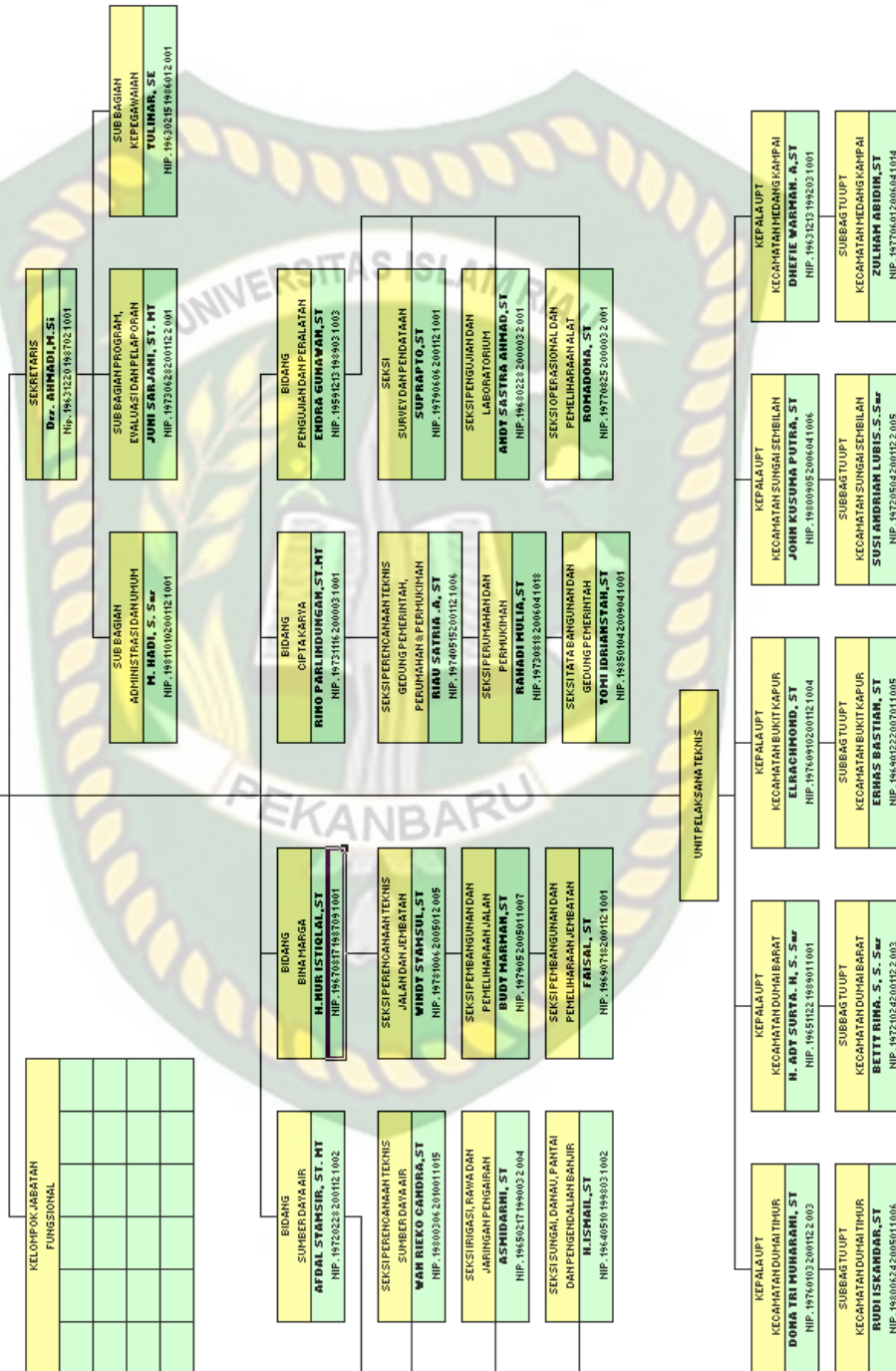
Seksi RTH Pertamanan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan anggaran Seksi RTH Pertamanan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) melaksanakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 3) melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, taman, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- 4) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan angpura tapal batas Kabupaten, ibukota Kabupaten dan Kecamatan;
- 5) melaksanakan teknis operasional penanaman, sarana dan prasarana pendukung lainnya pada kegiatan ruang terbuka hijau
- 6) melaksanakan penataan administrasi pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- 7) melaksanakan penelitian dan pengembangan pembibitan tanaman;
- 8) melaksanakan operasional pengelolaan laboratorium di bidang pertamanan;
- 9) melaksanakan penyebaran keragaman tanaman unggulan untuk penataan ruang terbuka hijau dan taman;
- 10) melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan lampu

jalan, taman dan sarana prasarana lainnya;

- 11) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- 12) melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan kelembagaan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan dibidang ruang terbuka hijau dan pertanaman;
- 13) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tugasnya;
- 14) melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi RTH Pertamanan;
- 16) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya,

PIR. KEPALADINAS  
H. SYAMSUDDIN J. ST, M.Si  
NIP. 196203051986031007



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari hakikatnya dalam sebuah penelitian penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansinya. Dalam penelitian ini tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin usia dan pendidikan informan.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut berada untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Adapun jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan Penelitian**

| No     | Jenis Kelamin | Informan | Persentase |
|--------|---------------|----------|------------|
| 1      | Laki-laki     | 5        | 62,5%      |
| 2      | Perempuan     | 3        | 37,5%      |
| Jumlah |               | 8        | 100%       |

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Penelitian ini dapat kita lihat diatas jenis kelamin informan sangat di dominasi oleh kaum laki-laki. Dalam penelitian ini terdapat 8 orang informan, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan.

## 2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia ,walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat beberapa keberagaman usia informan,

**Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Umur**

| No     | Tingkat Umur (Tahun) | Frekuensi | Persentase |
|--------|----------------------|-----------|------------|
| 1      | 26-33                | 1         | 12.5%      |
| 2      | 34-41                | 1         | 12.5%      |
| 3      | 42-49                | 6         | 75%        |
| Jumlah |                      | 8         | 100%       |

Sumber : Data Olahan Penenilitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur dari 8 orang yang dijadikan informan sebanyak 1 orang atau 12,5% berumur 26-33 tahun, sebanyak 1 orang atau 12,5% berumur 34-41 tahun, dan sebanyak 6 orang atau 75% berumur 42-49 tahun. Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar informan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir selain itu informan tersebut cukup berpengalaman dalam mengkritisi permasalahan peneliti.

### 3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis, ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui. Biasanya pemahaman seorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikan lebih rendah, dalam penelitian ini Tingkat Pendidikan Informan yaitu :

**Tabel V.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan     | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1  | SD                     | -      |
| 2  | SMP                    | -      |
| 3  | SMA                    | 4      |
| 4  | Sarjana / Diploma (S1) | 2      |

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| 5      | Magister (S2) | 2 |
| 6      | Doktor (S3)   | - |
| Jumlah |               | 8 |

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang Sekolah Dasar (SD) berjumlah 0 orang atau tidak ada, jenjang terakhir Sekolah Menengah Pertamah berjumlah 0 orang atau tidak ada, jenjang Sekolah Menengah Akhir (SMA) berjumlah 4 orang, Sarjana/Diploma IV berjumlah 2 orang, jenjang Magister/S2 berjumlah 2 orang. Dan jejang Doktor/S3 0 orang atau nihil.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan, masih kurangnya perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Raya di Kecamatan Dumai Timur. Sehingga peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui hambatan dalam meningkatkan kualitas jalan raya dikecamatan dumai timur.

#### **B. Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur**

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). (Soekanto, 2014:243) dimana indikator-indikator penilaian tersebut adalah :

1. Perangkat hak-hak dan kewajiban
  - a. Koordinasi antar pihak yang berwenang didalam dinas pekerja umum dalam pemeliharaan jalan.
  - b. Aturan tentang pemeliharaan jalan.
2. Aspek dinamis dari kedudukan
  - a. Melakukan pengawasan terhadap jalan yang rusak
  - b. Tindak lanjut dari penanganan jalan yang rusak
3. Prilaku sosial dan fungsi kedudukan
  - a. Menjalankan fungsi sesuai peraturan tentang Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
  - b. Usaha yang sudah dilakukan untuk memperbaiki jalan.

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 10 orang yang telah dicipatakan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya yang sesuai dengan judul peniliti.

#### **1. Perangkat hak-hak dan kewajiban.**

Berdasarkan indikator Perangkat hak- hak dan kewajiban mencakup beberapa

item-item penilaian untuk dijadikan pertanyaan bagi responden, hasil dari wawancara dengan pertanyaan Apakah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Sudah Melakukan Koordinasi Terhadap Instrumen-instrumen Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan diKecamatan Dumai Timur ? yang peneliti lakukan dengan ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur ialah.

*"Dalam meningkatkan kualitas jalan raya di kecamatan dumai timur sudah melakukan koordinasi ke Bidang Bina Marga khususnya kepada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan. Dalam beberapa ruas jalan dikecamatan Dumai Timur terdapat kesalahan konstruksi sehingga badan air hujan yang turun megenangi ruas jalan karena air tidak turun ke drainase sehingga air membuat kualitas jalan diKecamatan Dumai timur mengalami penurunan kualitas permasalahan tersebut ada sebelum saya menjabat Kepala UPT Kecamatan Dumai Timur. Mengenai aturan tentang pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. (Ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur 13 Januari 2020. 13.30 WIB )"*

Menurut peneliti jawaban dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan memang terdapat kesalahan kosntruksi pada beberapa ruas jalan dikecamatan Dumai Timur tentang air hujan yang tidak turun ke saluran

drainase sehingga air membuat kualitas jalan diKecamatan Dumai timur mengalami penurunan kualitas. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai menanyakan pertanyaan Apakah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Melakukan Pemeliharaan Jalan diKecamatan Dumai Timur ?.

*“ Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Sudah melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Sehingga diharapkan Pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan baik, dalam melakukan pemeliharaan jalan kami selaku penanggung jawab melakukan rencana umum pemeliharaan jalan, survei pemeliharaan jalan, programan pemeliharaan jalan, pembiayaan pemeliharaan jalan, perencanaan teknis pemeliharaan jalan, hingga akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. dalam kasus jalan rusak di kecamatan Dumai Timur memang terdapat kesalahan dalam pemeliharaan jalan dikarenakan kurangnya koordinasi kepada bagian-bagian terkait dalam pemeliharaan jalan. (Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. 13 Januari. 20:00 WIB) ”*

Dari tanggapan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Bidang Bina Marga dapat dilihat Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah paham akan Koordinasi antar pihak yang berwenang didalam dinas pekerjaa umum dalam pemeliharaan jalan dan aturan pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan, namun Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mengakui adanya miskomunikasi dalam melakukan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi penilikan jalan yang menyebabkan terlantarnya penanganan jalan rusak diKecamatan Dumai Timur dan menurut hasil observasi peneliti dilapangan kurangnya koordinasi antara Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Dumai Timur dalam melakukan rencana umum pemeliharaan jalan, survei pemeliharaan jalan, programan pemeliharaan jalan, pembiayaan pemeliharaan jalan, perencanaan teknis pemeliharaan jalan, hingga akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Beda halnya dengan pendapat pengguna jalan, mereka tidak merasakan hasil dari Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Rahmat Hidayat selaku pengguna jalan, ia menyatakan bahwa

*“ selama ini tidak ada perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah Kota Dumai, saya setiap hari melewati jalan ini (Jl. Soerkarno-Hatta), setahu saya jalan yang berlubang hanya ditimbun dengan pecahan batu oleh warga. Beberapa kali saya menabrak lubang Allhamdulillah tidak sampai celaka hanya kaget saja meleng sedikit bisa fatal (Rahmat Hidayat selaku pengguna jalan, 13 Januari 2020. 08.00) “*

Dari wawancara singkat di atas dari informan penelitian bahwasannya ia tidak menegetahui aturan pemeliharaan jalan karena tidak merasakan output dari aturan pemeliharaan jalan, informan mengungkapkan bahwa kondisi jalan sangat memprihatinkan terbukti berdasarkan wawancara informan berpendapat jalan

berlubang tidak ditangani dengan baik bahkan warga setempat menambal jalan yang berlubang dengan pecahan batu hasil dari swadaya yang berempati melihat jalan yang berlubang. Hal ini dilakukan agar pengguna jalan tidak celaka dalam melintasi jalan tersebut, dan hasil observasi peneliti di ruas Jl. Soekarno – Hatta benar terdapat limbah pecahan batu pada jalan berlubang hal ini guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa yang disebabkan jalan berlubang

Sejalan yang di ungkapkan pengguna jalan di JL. Arifin Ahmad yang di ungkapkan oleh Arief

*“ jalan disini sudah lama rusak sehingga membahayakan pengguna jalan lain, kalau memang betul aturan pemeliharaan jalan itu dilakukan maka tidak ada jalan yang rusak, inikan jalan rusak semua belum kalau musim hujan lubang-lubangkan ketutup air jadi sulit mengetahui kalau ada lubang. (Arief selaku pengguna jalan, 13 Januari 2020. 10.00 WIB) “*

Berdasarkan wawancara pengguna jalan di JL. Arifin Ahmad dapat dipahami tidak adanya pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, menurut informan JL. Arifin Ahmad sudah rusak sejak lama sehingga permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut. Informan berpendapat jika musim hujan telah tiba jalan yang berlubang akan tergenang air sehingga pengguna jalan tidak bisa melihat adanya jalan berlubang dari informasi tersebut bisa kita rasakan bahanya jika jalan rusak tidak ditangani dengan cepat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan Peneliti dilapangan menyimpulkan bahwasannya mengenai indikator Hak-Hak dan Kewajiban dengan item-item penelitian Koordinasi antar pihak yang berwenang didalam dinas pekerja umum

dalam pemeliharaan jalan. dan Aturan tentang pemeliharaan jalan. dapat dikatakan Dinas Pekerjaan Umum memahami konsep koordinasi anatar pihak yang berwenang tetapi belum maksimal dalam menerapkan aturan pemeliharaan jalan. Padahal dalam kegiatan pemeliharaan jalan perlu dilakukan koordinasi yang bersifat berkelanjutan dan memegang pedoman pada aturan pemeliharaan yang sudah ditetapkan sehingga jalan rusak berupa jalan berlubang, tidak rata, dan retak-retak bisa dihindari dengan adanya koordinasi dalam melaksanakan aturan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dan Peraturan Daerah no 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Dumai.

Selanjutnya berdasarkan hasil Observasi diatas maka dapat disimpulkan sebagai table berikut :

| NO | Uraian                  | Keterangan                                                                                 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Objek yang di Observasi | Dinas Pekerjaan Umum kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur |
| 2  | Pihak yang Terlibat     | Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kecamatan Dumai Timur    |
| 3  | Waktu kegiatan          | 13 januari 2020 pukul 10.00 – 20.00 Wib                                                    |
| 4  | Tempat kegiatan         | Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai                                                           |
| 5  | Peserta yang terlibat   | Key Informan, Informan dan Pengguna jalan raya                                             |
| 6  | Hasil Observasi         | Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan observasi |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | yang dilakukan Peneliti dilapangan menyimpulkan bahwasannya mengenai indikator Hak-Hak dan Kewajiban dengan item-item penelitian Koordinasi antar pihak yang berwenang didalam dinas pekerja umum dalam pemeliharaan jalan. dan Aturan tentang pemeliharaan jalan. dikatakan Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan koordinasi antar pihak yang berwenang tetapi belum maksimal dalam menerapkan aturan pemeliharaan jalan. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Aspek dinamis dari kedudukan

Aspek dinamis yaitu berhubungan erat dengan peranan sosial tertentu yaitu berhubungan dengan pengertian jabatan, jabatan dan jabatan tertentu. Peran sosial adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan seseorang individu dalam usahanya memenuhi tanggung jawab hak-hak dari status sosial. Status sosial seseorang dalam kehidupan kelompok dapat berdasarkan keanggotaan dalam kelompok yang tidak dibentuk seperti status usia, seks, dan sistem kekerabatan, dapat pula berdasarkan kelompok yang dibentuk seperti status edukasi, partai politik dll.

Berdasarkan definisi diatas peneliti melakukan penelitian dengan item penilaian melakukan pengawasan terhadap jalan yang rusak dan tindak lanjut dari penanganan jalan yang rusak, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Yaitu Pengawasan Terhadap Jalan Rusak Sudah Dilakukan ? kepada ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan

Dumai Timur menyampaikan :

*“ Untuk pengawasan pada jalan rusak sesuai aturan pemeliharaan dan arahan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memberikan arahan untuk terjun ke lokasi yang rusak dengan prinsip skala prioritas pekerjaan, untuk jalan yang dinilai rusak akan di bahas pada rapat internal Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dengan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dinas Pekerjaan Umum juga melibatkan masyarakat (swakelola) dalam pengawasan jalan rusak dengan melaporkan jalan rusak ke kotak saran yang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. (Ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur 13 Januari 2020. 13.30 WIB )”*

”

Berikut tanggapan diatas yang telah dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah melakukan pengawasan terhadap jalan rusak dengan melakukan pengasawan secara langsung atau terjun kelokasi jalan rusak untuk melihat kondis, Ibu Dona Tri Nurhani S.T menuturkan bahwasan dalam melakukan penanganan jalan rusak harus dilakukan dengan prinsip skala prioritas, itu berarti Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan penanganan merata pada kasus jalan rusak di Kecamatan Dumai Timur. Beliau menuturkan masyarakat yang merasa atau melihat jalan rusak bisa ikut andil dalam menangani jalan rusak tersebut dengan cara melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai melalui kotak saran atau ikut serta dalam program swakelola.

Sama halnya hasil wawancara pada Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam melakukan pengawasan jalan rusak berikut hasil wawancara :

*“ Dalam pengawasan jalan rusak Bidang Bina Marga ikut serta dengan Unit Pelaksana Teknis agar yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kondisi di lokasi jalan yang rusak. Dalam melakukan pengawasan jalan rusak Bidang Bina Marga konsentrasi pada Unit Pelaksana Teknis yang dianggap serius dalam melakukan pengawasan. (Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. 13 Januari. 20:00 WIB) ”*

Dari hasil wawancara peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan jalan rusak bahwasannya Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan jalan raya cukup baik dengan melakukan terjun langsung ke lokasi jalan rusak untuk mendapatkan data yang benar. Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan jalan rusak sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak bertanggung dalam melakukan pengawasan jalan rusak di kecamatan dumai timur.

Dalam melakukan pengawasan tidak lupa peneliti mewawancarai Camat Dumai Timur Zulfahren. S.sos, M.Si selaku pejabat tertinggi di kecamatan Dumai Timur, peneliti menanyakan Bagaimana Pendapat Bapak Melihat Kondisi Jalan diKecamatan Dumai Timur Yang Mengalami Kerusakan di Beberapa Ruas Jalan, Mengingat Kerusakan Jalan Tersebut Berpotensi Akan Membahayakan Warga

Bapak yang Ingin Beraktifitas. Berikut hasil tanggapan Camat Dumai Timur mengenai jalan rusak di wilayah Dumai Timur :

*“ Permasalahan jalan rusak di daerah saya memang cukup menarik perhatian saya sebagai Camat Dumai Timur dengan adanya jalan berlubang akan menghambat pelayanan dasar di kecamatan Dumai Timur. Untuk respon jalan rusak di kecamatan Dumai Timur kan sudah ada yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan saya tidak berwenang dalam menanggulangi jalan rusak jadi biarkan Dinas terkait melakukan tugasnya, kita hanya berharap permasalahan ini segera cepat selesa. (Zulfahren. S.sos, M.Si selaku Camat Dumai Timur. 14 Januari 2020 .10.00 WIB) ”*

Dari hasil wawancara terhadap Camat Dumai Timur terlihat hanya berharap dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam pengawasan rusak sehingga tidak terciptanya koordinasi dalam menanggulangi jalan rusak, menurut peneliti Camat Dumai Timur bisa mengirim memo/surat sesuai fungsi dan tugas Camat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pasal 224 ayat (1) huruf e yaitu mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai melakukan percepatan dalam menanggulangi jalan rusak baik melakukan pengawasan maupun perbaikan jalan rusak di kecamatan Dumai Timur.

Dalam pengawasan jalan rusak peneliti juga mewawancarai Nur selaku pengguna jalan di Jl. Datuk Laksamana berikut tanggapan pengguna yang melintasi jalan tersebut :

*“ selama ini saya tidak mengetahui hal tersebut, tapi saya tau kalau Dinas Pekerjaan Umum adalah yang bertanggung jawab dalam perbaiki jalan. (Nur selaku pengguna jalan 15 Januari 2020 10.00 WIB) “*

Dari tanggapan singkat diatas bahwasannya ia tidak mengetahui tentang hal pengasawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan hal tersebut hampir sama dengan pengguna jalan Putri di Jl. Sultan Syarif Kasim ia menuturkan :

*“ Untuk pengawasan jalan rusak saya tidak pernah mendengar Dinas Pekerjaan Umum melakukannya, logikanya jika Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan maka jalan yang rusak tidak akan parah, harusnya Dinas Pekerjaan Umum tanggap dengan jalan rusak. kan rakyat sudah bayar pajak jadi rakyat berhak mendapati fasilitas yang bagus (Putri selaku pengguna jalan 15 Januari 2020 13.00 WIB) ”*

Dari tanggapan diatas bahwasannya informan tidak pernah mendengar adanya pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan jalan rusak di ruas JL. Datuk Laksamana dan Jl. Sultan Syarif Kasim, namun berbeda tanggapan yang diberikan Arief selaku pengguna jalan di ruas JL. Arifin Ahmad ia berpendapat :

*“ Beberapa kali saya lihat Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawsan jalan rusak, mereka menandai jalan rusak dengan cat putih dan melakukan dokumentasi lalu memasang plang peringatan jalan rusak (Arief selaku pengguna jalan, 13 Januari 2020. 10.00 WIB) “*

Menurut informan yang peneliti tanyakan singkat responden diatas sesuai dengan prosedur pengawasan jalan rusak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Marga, hal tersebut sejalan dengan informasi responden Rahmat Hidayat di Jl. Soekarno-Hatta ia mangaku bahwa :

*“ saya melihat Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan jalan rusak dengan turun langsung ke lokasi jalan yang rusak, lalu memberi tanda dengan mengecat jalan yang berlubang dan melakukan dokumentasi berupa menfoto jalan yang berlubang (Rahmat Hidayat selaku pengguna jalan, 13 Januari 2020. 08.00) ”*

Berdasarkan tanggapan diatas pengguna jalan pada ruas jalan Jl. Arifin Ahmad dan ruas jalan Jl. Soekarno-Hatta bisa di simpulkan Dinas Pekerjaan Kota Dumai khususnya Unit Pelayan Teknis untuk kecamatan Dumai Timur sudah melakukan pengawasan jalan rusak namun untuk ruas Jl. Datuk Laksamana dan ruas Jl. Sultan Syarif Kasim belum melakukan pengawasan jalan rusak. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada responden tentang pengawasan jalan rusak di kecamatan Dumai timur tidak lupa peneliti melalukan wawancara sebagai tindak lanjut dalam penanganan jalan rusak, peneliti mewawancarai kepada ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur mengenai tindak lanjut dalam penanganan jalan rusak, berikut hasil wawancara :

*“ Mengenai tindak lanjut dalam penanganan jalan rusak kami Unit Pelaksanaan Teknis kecamatan Dumai Timur melakukan observasi terhadap jalan rusak untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan kemudian melalukan standar operasional prosedur dengan melakukan menandai jalan yang rusak dengan cat putih lalu*

*melakukan dokumentasi berupa foto, kemudian hal tersebut evaluasi bersama Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai untuk di bahas bersama pada rapat internal. Untuk kerusakan ringan seperti retak dan lubang dengan kedalaman tidak lebih dari 30 centimeter dan luas 1 meter maka akan dilakukan penambalan jalan berlubang untuk jalan yang tergolong rusak parah seperti patah atau rekonstruksi harus melakukan perencanaan yang cukup panjang, dan hal tersebut akan memakan waktu lama sehingga jalan yang rusak berat akan menjadi semakin parah (Ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur 13 Januari 2020. 13.30 WIB )”*

Dalam wawancara diatas beliau menuturkan tindak lanjut penanganan jalan rusak Unit Pelaksana Teknis melakukan observasi terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan, Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan dokumentasi sebagai alat bukti kerusakan jalan yang akan di koordinasikan kepada instrumen yang bertanggung jawab dalam penanganan jalan rusak diKecamatan Dumai Timur

Pada saat bersamaan peneliti mewawancarai Kepala Bidang Bina Marga Bapak H. Nur Istiqlal S.T dalam hal tindak lanjut penanganan jalan rusak, beliau menuturkan bahwa :

*“ Untuk penanganan jalan rusak sesuai arahan Plt. Dinas Pekerjaan Umum dan Walikota Dumai agar melakukan percepatan dalam menangani jalan rusak terutama untuk kecamatan-kecamatan yang dinilai atau sekiranya dapat perhatian khusus, termasuk kecamatan Dumai Timur sebagai kecamatan yang sering dilalui kendaraan-kendaraan bertonase besar. Dinas Pekerjaan Umum*

*melalui Bidang Bina Marga sudah melakukan penanganan jalan rusak sesuai dengan aturan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Preservasi Jalan. untuk percepatan penanganan sudah dilimpahkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis dan Bina Marga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan pembatasan lalu lintas kendaraan bertonase besar pada jalan yang mempunyai kelas-kelas agar ketahanan jalan tidak berkurang atau mudah hancur. (Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. 13 Januari. 20:00 WIB)”*

Berdasarkan wawancara di atas dengan informasi responden dari ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur dan Kepala Bidang Bina Marga Bapak H. Nur Istiqlal S.T dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan tindak lanjut penanganan jalan rusak di Kecamatan Dumai Timur, namun sangat di sayangkan berdasarkan observasi penanganan jalan rusak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai belum dikategorikan maksimal terlihat pada penanganan jalan rusak hanya berupa penambalan seperti diketahui penambalan pada jalan membuat jalan tidak rata sebab penambalan cenderung lebih tinggi dengan ketinggian jalan yang sebenarnya sehingga hal tersebut justru menambah kategori jalan bergelombang di kecamatan Dumai Timur dan membahayakan pengguna jalan.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan penanganan jalan rusak dengan solusi penambalan pada jalan yang berlubang dinilai kurang efektif karena jalan

yang berlubang bisa sewaktu-waktu bisa berlubang kembali dikarenakan konstruksi yang tidak tepat dalam pembangunan jalan sebelumnya, untuk penanganan jalan yang dikategorikan rusak parah dinilai cukup lambat sedangkan jalan merupakan bentuk pelayanan dasar dengan fungsi sebagai sarana dan prasarana transportasi dalam kegiatan ekonomi dan sebagai fungsi dalam pelayanan pemerintahan Kota Dumai.

Untuk mengetahui tindak lanjut dalam penanganan jalan rusak yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, peneliti melakukan wawancara kepada pengguna jalan tentang tindak lanjut penanganan jalan rusak. Berikut hasil wawancara Rahmat Hidayat pada Jl Soekarno-Hatta :

*“ Untuk tindak lanjut saya sudah melihat Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memperbaiki jalan rusak disini (Jl. Soekarno-Hatta) dengan melakukan tambalan pada jalan belubang (Rahmat Hidayat selaku pengguna jalan, 13 Januari 2020. 08.00)*

Berdasarkan wawancara terhadap informan Rahmat Hidayat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melakukan tindak lanjut dalam penanganan jalan rusak di Kecamatan Dumai Timur Hal tersebut sejalan dengan informan Arief pada Jl. Arifin Ahmad, Arif menuturkan :

*“ ya disini sudah dilakukan perbaikan jalan, ada yang ditambal ada juga yang perbaiki jalan yang bergelombang dan retak- retak (Arief selaku pengguna jalan, 13 Januari 2020. 10.00 WIB) “*

Dari wawancara singkat diatas bisa disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Telak melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Preservasi Jalan pada ruas Jl. Soekarno-hatta dan ruas Jl. Arifin ahmad terbukti apa yang dituturkan oleh kedua informan pada masing-masing ruas jalan di kecamatan Dumai Timur.

Peneliti juga mewawancarai informan selaku pengguna jalan Nur pada ruas Jl. Datuk Laksamana, dari hasil wawancara nur menuturkan sebagai berikut :

*“ Belum ada tindak lanjut dalam penanganan jalan rusak pada jalan ini (Jl. Datuk Laksamana) kita bisa lihat kalau jalan ini masih berlubang dan ada patahan pada jalan ini (Nur selaku pengguna jalan 15 Januari 2020 10.00 WIB) ”*

Berdasarkan wawancara singkat diatas terlihat Dians Pekerjaan Umum Kota Dumai belum melakukan pengawasan dan tindak lanjut penanganan jalan rusak di ruas Jl. Datuk Laksamana. Hal tersesbut di sampaikan juga oleh informan Putri selaku pengguna ruas Jl. Sultan Syarif Kasim. Ia menjelaskan sebagai berikut :

*“ Dijalan Sultan Syarif Kasim memang kerusakan jalan hanya berupa retak dan bergelombang, jadi tidak terlalu membahayakan tetapi bukan berarti luput dari perhatian pemerintah khususnya dinas yang bertanggung jawab atas maintance jalan Sultan Syarif Kasim (Putri selaku pengguna jalan 15 Januari 2020 13.00 WIB) ”*

Selanjutnya bila dilihat hasil Observasi maka penulis membuat table sebagai berikut :

| NO | Uraian                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Objek yang di Observasi | Dinas Pekerjaan Umum kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Pihak yang Terlibat     | Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kecamatan Dumai Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Waktu kegiatan          | 13 januari 2020 pukul 10.00 – 20.00 Wib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Tempat kegiatan         | Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Peserta yang terlibat   | Key Informan, Informan dan Pengguna jalan raya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Hasil Observasi         | Berdasarkan observasi maka dapat disimpulkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yaitu sesuai dengan item penilaian melakukan pengawasan terhadap jalan yang rusak dan tindak lanjut dari penanganan jalan yang rusak sudah melaksanakan tugas dengan baik, namun untuk beberapa ruas jalan dikecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan baik mengingat Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan terhadap jalan yang rusak berdasarkan skala prioritas kerja yang di kategorikan darurat. Sehingga ruas jalan yang |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | tidak termasuk skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terabaikan, jika di telisik lebih lanjut jalan yang rusak ringan menunjukkan gejala-gejala kerusakan lebih parah lalu akan menjadi hancur dikemudian hari dan menambah pekerjaan rumah bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Prilaku sosial dan fungsi kedudukan

Sesuai definsi peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). (Soekanto, 2014:243) yaitu indikator prilaku sosial dan fungsi sosial dengan item penelitian yaitu Menjalankan fungsi sesuai peraturan tentang Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Usaha yang sudah dilakukan untuk memperbaiki jalan. dengan uraian di atas maka peneliti melakukan wawancara kepada Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai bapak Zulkarnaen S.T. M,Si dengan pertanyaan Apakah Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ? beliau berpendapat bahwa :

*" Dinas Pekerjaan umum sudah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, melalui peraturan daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai instrumen yang bertanggung jawab atas perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kota Dumai dan melalui Unit Pelaksana Teknis dalam implementasi peraturan daerah tersebut. dalam perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan seluruh pihak yang berwenang melakukan koordinasi terutama Bidang Bina Marga beserta seksi dan Bidang Cipta Karya beserta seksi, dengan adanya koordinasi antar pihak-pihak yang bertanggung jawab maka di harapkan perencanaan tersebut sudah tepat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tidak mau salah melakukan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan seperti yang terdahulu, kita bisa lihat kesalahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di beberapa lokasi. Contoh saja di jalan Soekarno-Hatta dimana komposisi aspal yang kurang tepat sehingga jalan tersebut tidak sesuai spesifikasi dengan lalu lintas yang ada, dan beberapa ruas jalan di Kota Dumai terutama di kecamatan-kecamatan yang menjadi skala prioritas kami termasuk kecamatan Dumai Timur. (Zulkarnaen S.T. M,Si selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai 15 Januari 2020. 20:00 WIB)"*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zulkarnaen S.T. M,Si dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan namun, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai hambatan-hambatan dalam meningkatkan kualitas jalan di kecamatan Dumai Timur dikarenakan adanya kesalahan konstruksi dan harus melakukan rekonstruksi jalan, sehingga akan memakan waktu dan biaya yang sangat tinggi dengan adanya kesalahan konstruksi dan sebelum adanya rekonstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum maka rehabilitas jalan dikecamatan Dumai Timur hanya pekerjaan yang memakan tenaga dan biaya.

Dalam wawancara berikutnya peneliti menanyakan item penilaian yaitu usaha yang sudah dilakukan usaha yang sudah dilakukan untuk memperbaiki jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, berikut wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Bapak H. Nur Istiqlal S.T :

*“ untuk usaha yang dilakukan untuk memperbaiki jalan rusak dikecamatan Dumai Timur hanya sebatas rehabilitas jalan berupa menambal jalan yang berlubang untuk solusi jangka pendek, untuk rekonstruksi dalam meningkatkan kualitas jalan dikecamatan Dumai Timur perlu adanya rancangan rekonstruksi terlebih dahulu lalu akan di sampaikan pada bidang-bidang yang bertanggung jawab dalam rekonstruksi, dan untuk jalan bergelombang akan kita lakukan aspal*

*ulang dengan membuka lapisan terluar aspal yang bergelombang terlebih dahulu dan baru akan di aspal ulang. (Bapak H. Nur Istiqlal S.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. 13 Januari. 20:00 WIB) ”*

Dari wawancara diatas pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa Bidang Bina Marga sudah melakukan rehabilitas jalan jangka pendek dan belum melakukan pemeliharaan berkala jalan yaitu kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Unit Pelaksana Teknis kecamatan Dumai Timur yaitu ibu Dona Tri Nuharani S.T beliau berpendapat :

*“ UPT kecamatan Dumai Timur untuk saat ini hanya melalukan rehabilitas jalan berupa penambalan jalan berlubang dan jalan bergelombang, UPT tidak bisa melakukan lebih pada dari itu sebab UPT hanyalah pelaksana teknis yang melaksanakan tugas berdasarkan hirakri pekerjaan secara vertikal yang dimana mempunyai keterbatasan pengelolaan dana keuangan dan sumber daya manusianya. (Ibu Dona Tri Nuharani S.T selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Dumai Timur 13 Januari 2020. 13.30 WIB )”*

Berdasasrkan observasi pada ruas jalan yang berlubang sudah ditambal namun tambalan tersebut diperkirakan tidak bertahan lama hal ini disebabkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai melalui Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kecamatan Dumai Timur melakukan Rehabilitias jalan yang sifatnya jangka pendek

dikarenakan kekurangan dana. Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Menjalankan fungsi sesuai peraturan tentang Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. dan usaha yang sudah dilakukan untuk memperbaiki jalan. namun hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan kualitas jalan dikecamatan Dumai Timur. Terbukti dalam usaha untuk memperbaiki jalan rusak hanya dilakukan penambalan pada jalan berlubang dan bukan melakukan rekonstruksi jalan, jika hanya melakukan penambalan hal tersebut akan hanya menjadi solusi jangka pendek, dan tidak menyelesaikan akar permasalahan dari jalan rusak tersebut.

Untuk mempermudah dalam perbandingan hasil Wawancara dan Observasi maka penulis membuat table sebagai berikut :

| NO | Uraian                  | Keterangan                                                                                 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Objek yang di Observasi | Dinas Pekerjaan Umum kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur |
| 2  | Pihak yang Terlibat     | Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kecamatan Dumai Timur    |
| 3  | Waktu kegiatan          | 13 januari 2020 pukul 10.00 – 20.00 Wib                                                    |
| 4  | Tempat kegiatan         | Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai                                                           |
| 5  | Peserta yang terlibat   | Key Informan, Informan dan Pengguna jalan raya                                             |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Hasil Observasi | <p>Berdasarkan observasi hasil wawancara penelitian yang dilakukan lapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan namun, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai hambatan-hambatan dalam meningkatkan kualitas jalan di kecamatan Dumai Timur dikarenakan adanya kesalahan konstruksi dan harus melakukan rekonstruksi jalan, sehingga akan memakan waktu dan biaya yang sangat tinggi dengan adanya kesalahan konstruksi dan sebelum adanya rekonstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum maka rehabilitas jalan dikecamatan Dumai Timur hanya pekerjaan yang memakan tenaga dan biaya.</p> |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Hambatan – Hambatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat yang ditemui Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur, hambatan – hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Mempunyai batasan biaya dan waktu dalam melakukan penanganan jalan rusak.
2. Pelaksanaan pemeliharaan jalan terkendala cuaca dan lalu lintas yang padat.
3. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas dan tidak sebanding dengan luas jalan yang harus ditangani. Sarana dan prasarana yang kurang seperti mobil dinas maupun alat berat yang kurang memadai. Berikut rincian jumlah Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan Dumai Tiimur :

| Jabatan                      | Jumlah |
|------------------------------|--------|
| Kepala Unit Pelaksana Teknis | 1      |
| Sub Bagian TU                | 1      |
| Kepala Seksi Jalan           | 1      |
| Kepala Seksi Jembatan        | 1      |
| Staff                        | 7      |

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Dumai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis berjumlah 1 orang, Sub Bagian TU UPT berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Jalan berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Jembatan 1 Orang dan Staff berjumlah 7 orang dengan total berjumlah 12 orang. Untuk sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Dumai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dimiliki yakni :

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1  | Pick- up             | 3      |
| 2  | Alat berat           | 3      |
| 3  | Alat bantu           | -      |

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Dumai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai*

Sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Dumai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ialah 3 mobil operasional berjenis pick up berjumlah 3 dan untuk alat berat berjenis excavator mini berjumlah 1, tandem roller berjumlah 1 dan motor grader berjumlah 1. Alat bantu tidak diketahui jumlahnya berapa.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan deskriptif yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasannya Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, analisis yang dilakukan mendapati bahwa dalam melakukan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota sudah menjalankan fungsi sesuai peraturan tentang Peraturan Daerah Kota Dumai No 16 Tahun 2008 Bagian Keempat Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah pada Pasal 13 dan huruf (c) yaitu Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Namun untuk beberapa ruas jalan dikecamatan Dumai Timur belum dilakukan penanganan jalan rusak hal tersebut disebabkan oleh tidak termasuk skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum, berhubungan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum tetap melakukan pengawasan terhadap jalan-jalan yang dikira perlu dilakukan pengawasan

2. Dari hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam meliputi : Sarana dan prasarana yang masih kurang, jumlah dan kualitas sumber daya, persepsi dan pandangan masyarakat dan kondisi alam

#### **B. Saran**

Dalam hasil kesimpulan yang telah diturunkan diatas tentang Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Timur, adapun saran – saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai hendaknya memperbaiki sistem kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dengan memanfaatkan program pelelangan kegiatan, dengan ini diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan efektif dan efisien.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai perlu menetapkan jadwal kegiatan preservasi jalan sesuai dengan keadaan cuaca di kota dumai dan melakukan pekerjaan diluar jam sibuk
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai perlu evaluasi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai seperti : mobil dinas dan alat berat serta pendukung lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Awang,Azam & Wijaya Mendra,2012, *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru; Alaf Riau\

Budiarjo, Mirian. 2008 *Dasar-Dasarr Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Handoko, T. Hani Handoko . 2003 . *Manajemen* . Edisi 2 . Penerbit BPFE Yogyakarta , Yogyakarta .

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hanim, Sofian, 2013, *pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia*. Pekanbaru; UIR pers

Kansil,CST dan Christine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara

Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Balai Pustaka

Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Cetakan Ketujuh, Bandung; Mandar Maju

Moenir, H.A.S, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara ; Jakarta

Ndraha Taliziduhu,2003, *kybernologi I ( Ilmu Pemerintahan baru )*, Jakarta; PT. Rineka Cipta

Ndraha Taliziduhu,2005, *kybernologi II ( Ilmu Pemerintahan baru )*, Jakarta; PT. Rineka Cipta

Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta; Grasindo

Sarundjang, S.H. 2001. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta; Sinar Harapan

Syafiee, Inu Kencana.2011. *Penganta Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Bumi Aksara.

- Sugiyono, 2018. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung; Alfabeta
- Suyonto, Danang, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta; CAPS
- Supriyanto, Budi, 2009. *Manajemen pemerintahan ( Plus Dua Belas Langkah Strategis )*, Tangerang; Media Berlian
- Sedarmayanti.2004. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Syafie, Kencana 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo
- Thoha, M. (2011). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada; Jakarta
- Yohanes. Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

### **Dokumen**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
- Peraturan Daerah no 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Dumai.